

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Rembang memiliki beberapa program dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2016-2021. Salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada visi Kabupaten Rembang dalam rangka menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang adalah terkait adanya beberapa aset wisata yang dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata yang sesuai dengan misi Kabupaten Rembang.

Kabupaten Rembang memiliki daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang menjanjikan. Kabupaten Rembang memiliki kenampakan alam yang bisa dijadikan sebagai potensi wisata guna mendukung perekonomian daerah. Jumlah obyek wisata di Kabupaten Rembang ditunjukkan dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Obyek Wisata di Kabupaten Rembang

No.	Obyek Wisata	Jumlah
1.	Pantai Karang Jahe	1
2.	Pantai Caruban	1
3.	Taman Rekreasi Pantai Kartini	1
4.	Wana Wisata Kartini Mantingan	1
5.	Pasujudan Sunan Bonang	1
6.	Makam RA Kartini	1
7.	Museum RA Kartini	1
Jumlah		7

Sumber : BPS Kabupaten Rembang

Obyek wisata yang dikelola dengan baik bisa meningkatkan pendapatan daerah di sektor pariwisata. Namun, pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Rembang masih belum terkelola dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya persentase kemiskinan di Kabupaten Rembang apabila dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya, seperti Kabupaten Pati, Blora, Kudus, dan Jepara. Persentase kemiskinan di Kabupaten Rembang digambarkan dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang dan Sekitarnya pada Tahun 2016-2020 (dalam persentase)

Wilayah	Kemiskinan				
	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Rembang	18.54	18.35	15.41	14.95	15.60
Kabupaten Blora	13.33	13.04	11.90	11.32	11.96
Kabupaten Pati	11.65	11.38	9.90	9.46	10.08
Kabupaten Jepara	8.35	8.12	7.00	6.66	7.31
Kabupaten Kudus	7.65	7.59	6.98	6.68	7.17

Sumber : BPS Jawa Tengah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang memiliki tingkat persentase kemiskinan yang cukup besar sejak tahun 2017 yaitu sebesar 18.35%. Meskipun setiap tahun mengalami penurunan, yaitu sebesar 15.41% pada tahun 2018. Namun, tetap saja persentase kemiskinan yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang tetap lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya seperti Kabupaten Jepara (8.12%), Kabupaten Kudus (7.59%), Kabupaten Pati

(11.38%), dan Kabupaten Blora (13.04%). Hal ini jelas memperlihatkan bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Rembang cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain disekitarnya.

Tabel 1.3

Penduduk Miskin Kabupaten Rembang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Penduduk Miskin	
		Jumlah Penduduk (000)	Persentase (%)
1.	2016	115.49	18.54
2.	2017	115.19	18.35
3.	2018	97.44	15.41
4.	2019	95.26	14.95
5.	2020	100.08	15.60

Sumber : BPS Kabupaten Rembang

Pada tahun 2018, penduduk miskin di Kabupaten Rembang berjumlah sebanyak 97.440 jiwa. Hal ini memang mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga ke tahun 2017. Namun, Kabupaten Rembang masih menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Kemiskinan yang dialami oleh Kabupaten Rembang justru tidak sebanding dengan potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Salah satunya adalah di sektor pariwisata. Kabupaten Rembang memiliki daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang menjanjikan. Kabupaten Rembang memiliki kenampakan alam yang bisa dijadikan sebagai potensi wisata guna mendukung perekonomian daerah. Kabupaten Rembang memiliki 7 (tujuh) obyek wisata yang masih aktif beroperasi. Obyek wisata tersebut tersebar ke dalam beberapa daerah di Kabupaten Rembang, satu diantaranya terdapat di Desa Punjulharjo di Kecamatan Rembang.

Desa Punjulharjo merupakan salah satu desa dengan aset wisata di Kabupaten Rembang. Di desa ini terdapat 2 (dua) obyek wisata sekaligus, yaitu wisata pantai (Pantai Karang Jahe) dan wisata sejarah (Situs Perahu Kuno). Pantai Karang Jahe dijadikan sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Rembang. Hal ini jelas membuktikan bahwa Desa Punjulharjo memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan potensi daerah melalui sektor pariwisata. Desa ini juga dijadikan sebagai desa percontohan dalam mengelola potensi wisata yang dimiliki.

Kepala Desa Punjulharjo mulai menyadari akan pentingnya pemberdayaan masyarakat setelah melihat kondisi perekonomian warganya yang masih banyak diklasifikasikan dalam masyarakat kurang mampu. Melihat ada potensi pantai dan situs perahu kuno, pemerintah mulai memberdayakan masyarakat di sektor pariwisata. Masyarakat mulai dilibatkan dalam pengelolaan Pantai Karang Jahe dan Situs Perahu Kuno di Desa Punjulharjo.

Pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata yang dilakukan oleh Kepala Desa tertuang dalam Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Obyek Wisata Pantai Karang Jahe dan Situs Perahu Kuno. Peraturan tersebut memuat tentang tata kelola obyek wisata di desa Punjulharjo dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan masyarakat yang dimaksud adalah mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola obyek wisata di Desa Punjulharjo, yang berupa sebagai pengelola obyek wisata, pedagang, dan penyedia wahana di obyek wisata.

Pengelola obyek wisata adalah kelompok masyarakat yang ditunjuk dan dipilih berdasarkan musyawarah desa yang berbentuk Badan Pengelola dengan masa jabatan 3 tahun. Badan pengelola berhak mendapatkan penghasilan setiap bulannya serta tunjangan lain sehingga masyarakat yang tergabung ke dalam Badan Pengelola dapat menambah penghasilan mereka. Selain melibatkan masyarakat dalam Badan Pengelola Obyek Wisata, Kepala Desa Punjulharjo juga melibatkan masyarakat sebagai pedagang dan penyedia wahana wisata di obyek wisata Pantai Karang Jahe.

Setiap warga yang hendak berjualan dan menjadi penyedia wahana di obyek wisata Pantai Karang Jahe harus menunjukkan KTP domisili di Desa Punjulharjo dan KK. Dan setiap kepala keluarga (KK) hanya diizinkan memiliki 2 jenis usaha yang berbeda. Hal ini dilakukan agar masing-masing kepala keluarga di Desa Punjulharjo bisa terlibat dalam pengelolaan obyek wisata. Namun, dalam melakukan pemberdayaan masih terjadi kendala. Salah satunya adalah keterlibatan warga desa yang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan program pemberdayaan yang belum bisa melibatkan semua warga di Desa Punjulharjo. Hal ini diungkap oleh salah satu pedagang di Pantai Karang Jahe, beliau mengatakan bahwa :

“Saya jarang ikut kumpul-kumpul, Mba. Soalnya yang sering ikut itu dari pengelola saja. Terus biasanya juga waktu kumpulnya susah buat saya bisa ikut, kan saya juga harus dagang.”

Selain itu, permasalahan lain yang ada pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah tujuan pemberdayaan masyarakat terkait peningkatan pendapatan juga masih dirasa belum optimal. Hal ini disampaikan oleh salah satu pedagang warung, beliau mengatakan bahwa :

“Ya jualan kan gak selalu ramai, Mba. Sekarang kalau lagi ramai, banyak sepiunya soalnya pada bawa bekal sendiri dari rumah. Jadi pada gak jajan di warung. Pemasukan jadi sedikit.”

Menurut salah satu pihak dari Badan Usaha Milik Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Penyedia ATV sudah kebanyakan, Mba. Jadi kalau lagi rame itu biasanya ATV suka membahayakan pengunjung soalnya pakai rute yang dilarang. Terus, itu biasanya pedagang yang jualan di bawah pohon cemara juga susah dibilangin, padahal itu gak dibolehin soalnya ganggu tumbuhnya pohon cemara.”

Pendapat dari salah satu pihak BUMDES mengisyaratkan bahwa masih ada permasalahan terkait ketaatan warga terhadap regulasi yang ada dalam program pemberdayaan masyarakat. Padahal, peraturan tersebut sengaja dibuat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung serta menjaga kelestarian Pantai Karang Jahe. Namun, masyarakat masih saja tidak menghiraukan hal tersebut.

Berdasarkan kenyataan di atas, menarik untuk diadakan penelitian berkenaan dengan program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Kabupaten Rembang (Studi Kasus di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang), maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata di Kabupaten Rembang (Studi Kasus di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang).

1.2. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya keaktifan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo.
2. Peningkatan pendapatan sebagai tujuan dalam program pemberdayaan masyarakat masih belum optimal.

3. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap regulasi yang ada dalam program pemberdayaan masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1 Bagaimana efektivitas program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo ?
- 1.3.2 Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai keefektifan program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo. Secara lebih terperinci beberapa hal yang ingin diraih adalah :

- 1.3.1 Untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo.
- 1.3.2 Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan pada sektor kepastakaan yang ada di bidang ilmu sosial dan ilmu politik secara umum serta pengembangan dalam bidang bidang ilmu administrasi publik secara khusus,

utamanya pada bidang teori-teori ilmu yang membahas mengenai pemberdayaan masyarakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Punjulharjo yang berbasis sektor pariwisata. Agar program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan dapat berjalan lebih baik.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berasal dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan atau biasa disebut dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti berasal dari jurnal. Penelitian terdahulu dari berbagai jurnal antara lain sebagai berikut :

1. Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang

Jurnal ini mengambil lokus di Puskesmas Srandol. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Terdapat lima indikator yang dipergunakan untuk mengukur efektivitas program BPJS ini, yaitu: pemahaman program, tujuan program, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, serta perubahan nyata (Sutrisno, 2007:125-126). Penilaian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung nilai rata-rata persentase tiap-tiap indikator efektivitas dengan skala likert. Penentuan kelas interval dilakukan agar dapat melihat efektivitas program. Berdasar nilai rata-rata dari 5 indikator yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas program BPJS Kesehatan di Kota

Semarang (studi kasus pada pasien pengguna jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srandol) dapat dikatakan efektif dengan nilai 2,88.

2. Efektivitas Program Pendidikan Bina Lingkungan pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Kota Karang Raya Kota Bandar Lampung

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif yang berlokasi di Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur. Penilaian efektivitas program dilakukan dengan membagi data lapangan dengan target yang diinginkan untuk dikalikan dengan seratus persen. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Umumnya, hasil efektivitas program pendidikan Bina Lingkungan pada masyarakat nelayan Kelurahan Kota Karang Raya dapat dinyatakan cukup efektif dengan perolehan perhitungan sebesar 77,31%. Beberapa manfaat yang diperoleh setelah adanya program Bina Lingkungan diantaranya, mengurangi biaya atribut sekolah misalnya tas, sepatu, seragam, dan yang lainnya, menumbuhkan semangat belajar pada anak, serta manfaat terbesarnya yaitu membantu akses pendidikan bagi masyarakat nelayan yang kurang mampu secara ekonomi di Kelurahan Kota Karang Raya.

3. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan

Penelitian ini berlokasi di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan sebagai target kegiatan PNPM-Mandiri. Penulis memilih pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menganalisa secara deskriptif berdasarkan data

statistik. Pengukuran efektivitas menggunakan ukuran tentang pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Ukuran tersebut meraih hasil sebesar 63.6%, 62.3%, dan 60.8% yang berada pada rentang efektif. Fokus dalam penelitian ini adalah indikator terendah yang berjumlah empat indikator yang meliputi kualitas kemampuan masyarakat, sosialisasi tidak langsung, perilaku pelaksana, dan pengembalian pinjaman yang memiliki persentase dibawah 60%.

4. Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Tabayun Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

Lokus penelitian ini berada pada Kabupaten Bogor di daerah Cibinong dengan metode kuantitatif. Penelitian dilakukan guna mengkaji keterkaitan antara ciri-ciri sasaran program dengan efektivitas program, serta mengkaji tentang keterkaitan efektivitas program dengan perubahan perilaku responden. Variabel efektivitas yang dijadikan sebagai acuan adalah sosialisasi program, ketepatan sasaran program, pemantauan, serta pencapaian tujuan. Hasil yang didapatkan adalah program pemberdayaan belum terlaksana dengan efektif, serta adanya hubungan signifikan antara ciri-ciri sasaran program dengan efektivitas program. Sedangkan, efektivitas program tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan perubahan perilaku sasaran program.

1.6.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah tolak ukur derajat kesuksesan organisasi dalam berkegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Subagyo (2000) berpendapat bahwa efektivitas dilihat sebagai sebuah keselarasan hasil dengan tujuan yang dikehendaki. Sedangkan, menurut Gie (1997) dikatakan efektif apabila pekerjaan

yang dikerjakan bisa menghasilkan manfaat seperti yang dikehendaki. Hani Handoko (2014) menyatakan bahwa efektivitas dapat dilihat dengan pemilihan tujuan yang sesuai atau metode yang sesuai untuk mewujudkan tujuan yang dibuat. Contohnya adalah manajer menjadi efektif apabila dapat memprioritaskan pekerjaan yang dipilih atau metode yang sesuai dengan tujuan. Teori efektivitas melingkupi beragam faktor dalam dan luar pada suatu organisasi.

Siagian (2010:151) menyatakan bahwa pekerjaan bisa disebut efektif apabila dituntaskan sesuai waktu terlebih dahulu ditetapkan atau ketika perencanaan pekerjaan dapat dijalankan dan diselesaikan. Tjokroamidjojo dalam Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa penilaian efektivitas apabila hasil yang diraih sesuai dengan keinginan serta bisa melampaui tujuan yang telah sengaja dibuat dan dapat dijalankan dengan lebih baik dari rencana. Dari beberapa definisi efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa suatu pekerjaan berjalan efektif apabila telah dijalankan sesuai dengan tujuan pada awal perencanaan dan bisa mencapai target serta tujuan dari pekerjaan tersebut.

1.6.2.1 Efektivitas Program

Efektivitas program dimaksudkan untuk menilai sejauhmana suatu program berjalan, agar bisa meraih target atau rencana yang sudah ditentukan. Dalam melakukan pengukuran efektivitas, diperlukan adanya indikator atau variabel sebagai dasar pengukurannya. Para ahli merumuskan indikator yang berbeda untuk digunakan dalam pengukuran efektivitas. Menurut Sutrisno (2007:125-126) efektivitas program di dalam sebuah organisasi dapat diukur dengan melihat aspek pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, serta

perubahan nyata. Adapun penjelasan variabel efektivitas program menurut Sutrisno (2007) adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman program : dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program.
2. Tepat sasaran : dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
3. Tepat waktu : dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan : diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
5. Perubahan nyata : diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Selain itu, pendapat Budiani (2007:5) dalam Khadafi dan Mutiarin (2017), mengatakan bahwa pengukuran sebuah program yang efektif dapat diukur dengan indikator melalui :

1. Ketepatan program yang menilai keselarasan antara tujuan yang dicapai dengan sasaran atau obyek dalam pelaksanaan program.
2. Sosialisasi program melihat aspek kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara program sehingga masyarakat dan penerima manfaat program bisa mendapatkan informasi tentang program yang dilakukan.
3. Tujuan program dinilai dengan adanya kesamaan antara tujuan program yang ditetapkan dengan hasil program yang dilaksanakan.

4. Pemantauan program dinilai dengan kegiatan untuk memantau dan mengawasi program yang telah dilaksanakan.

1.6.3 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata

1.6.3.1 Definisi Pemberdayaan Berbasis Pariwisata

Pemberdayaan bisa diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan banyak orang di satu daerah atau lingkungan dalam rangka melaksanakan sebuah keputusan dengan penuh tanggung jawab yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Robbins, Chatterje, & Canda (1998) menyatakan bahwa pemberdayaan dinilai sebagai sebuah kegiatan yang mengajak individu maupun kelompok dengan tujuan mendapatkan kewenangan, aksesibilitas terhadap sumber daya alam, serta mengawasi hidupnya sehingga dapat meraih tujuan yang diinginkan.

Pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai sebuah usaha pemberian kekuatan dan penguatan kepada masyarakat (Mas'oed, 1990). Masyarakat yang berdaya oleh Sumonodiningrat (1997) dipahami sebagai membangun masyarakat yang berdaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang saling bekerja sama di dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, dapat diketahui bahwa pemberdayaan berarti memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat.

Dharmawan (2000) menggambarkan arti dari pemberdayaan sebagai sebuah proses yang memungkinkan seseorang dalam meningkatkan kemampuannya, mengambil keputusan, dan bisa mendapat kemudahan akses sumber daya demi kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan merujuk pada kapabilitas seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk :

- a. Akses yang dimiliki oleh kelompok rentan terhadap sumber-sumber produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan perolehan jasa yang dibutuhkan.
- b. Partisipasi kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan yang berpengaruh pada kehidupannya. (Swift dan Levin, 1987).

Pemberdayaan dapat digambarkan sebagai suatu cara pemenuhan keperluan yang diperlukan oleh individu, masyarakat, serta kelompok sehingga masyarakat mampu untuk mengambil keputusan dan mengawasi lingkungannya dalam rangka pemenuhan keinginannya. Sumodiningrat (1997) menyatakan bahwa pada prinsipnya pemberdayaan berfokus pada orang dan kemanusiaan.

Anthony Bebbington (2000) mengungkapkan bahwa pemberdayaan adalah proses dimana individu bisa berpartisipasi secara penuh dalam penetapan keputusan terkait pertumbuhan, perkembangan, serta penyaluran produknya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara peningkatan kehidupan lapisan masyarakat yang masih berada pada garis kemiskinan dan kekurangan atau dengan kata lain bertujuan untuk memandirikan dan memampukan masyarakat.

Terdapat tiga aspek dalam upaya memberdayakan masyarakat, yang meliputi :

1. Mengembangkan potensi masyarakat dengan menciptakan suasana yang kondusif. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan mengenalkan masyarakat terhadap potensi-potensi yang bisa berkembang. Pemberdayaan dilakukan dengan proses membangun masyarakat dengan memajukan, memberi semangat, dan memunculkan adanya

kesadaran tentang potensinya serta berusaha untuk meningkatkan potensinya.

2. Meningkatkan potensi yang ada pada masyarakat (empowering). Penguatan potensi dapat dilakukan dengan membuat langkah-langkah yang jelas seperti memberikan berbagai saran, serta membuka akses kepada masyarakat agar lebih berdaya. Pemberdayaan bukan hanya aspek penguatan individu, tetapi juga institusinya. Salah satunya dengan menumbuhkan nilai-nilai kerja keras, bijak, terbuka, dan bertanggung jawab. Jadi, inti pemberdayaan bukan hanya berfokus pada potensi individu, tetapi juga institusi yang menjalankan.
3. Memberdayakan dapat diartikan sebagai sebuah perlindungan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah masyarakat yang lemah untuk bertambah lemah karena ketidakmampuan berhadapan dengan yang kuat. Perlindungan tidak sama dengan menutup diri dari masyarakat. Perlindungan dilakukan untuk menciptakan sebuah persaingan yang adil dan merata, mencegah penindasan dari pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Memberdayakan bukan bermaksud untuk menciptakan ketergantungan masyarakat pada program-program yang diberikan. Konsep utama dalam pemberdayaan adalah masyarakat bukan obyek dari program pembangunan, tetapi pelaku dalam sebuah program pembangunan.

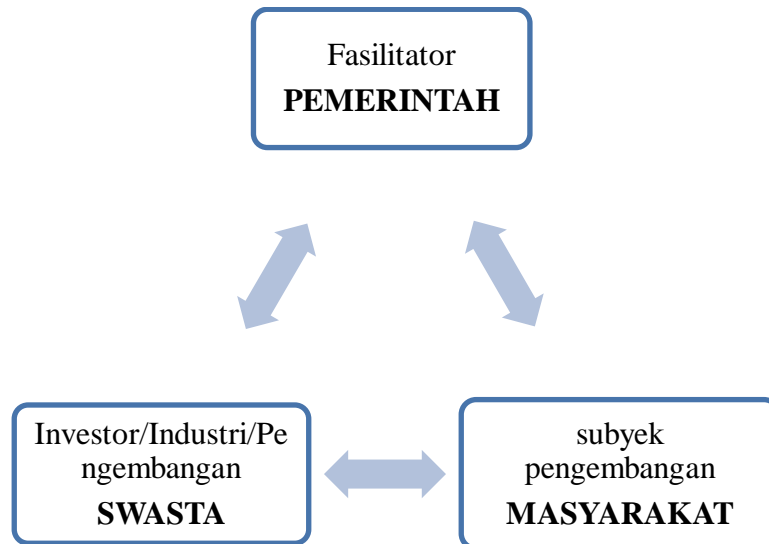
Sedangkan, menurut Wardiyanto (2011:3) pariwisata adalah sebuah perjalanan yang sengaja direncanakan oleh kelompok maupun perorangan dengan

berpindah-pindah tempat guna memperoleh perasaan puas ataupun perasaan senang. Kemudian Damanik dan Weber (Hari Karyono, 1997: 1) berpendapat bahwa pariwisata merupakan kegiatan pergerakan secara kompleks yang meliputi orang, jasa, maupun barang. Pariwisata sering dikaitkan dengan hubungan antar individu serta lembaga, penyedia kebutuhan layanan, sebuah komunitas, dan lainnya. Arti pariwisata secara luas merupakan perjalanan untuk sementara waktu dari satu tempat menuju tempat lainnya baik sendiri maupun berkelompok untuk mencari keselarasan dan rasa bahagia terhadap lingkungan dalam perspektif social, alam, budaya, serta ilmu (JJ. Spilance, 1993: 21).

Menurut Hari Karyono (1997: 15), arti pariwisata secara umum adalah seluruh kegiatan dunia usaha, masyarakat, serta kegiatan pemerintah yang berguna mengurus, melayani, serta mengatur segala keperluan wisatawan Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan mudahnya pelayanan jasa, serta berbagai faktor lain yang dapat menunjang kegiatan ini, yang disiapkan oleh masyarakat maupun pemerintah, untuk mewujudkan harapan wisatawan yang datang. Oka A Yoeti (1992: 109) berpendapat bahwa terdapat berbagai faktor utama dalam pariwisata, meliputi :

- a) Perjalanan yang bersifat sementara
- b) Perjalanan yang ditandai dengan adanya perpindahan lokasi
- c) Berkaitan tamasya atau rekreasi
- d) Orang yang melakukan perjalanan hanya sebagai pengunjung bukan bermaksud untuk bekerja di tempat yang dikunjungi.

Adapun pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1

Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata

Sumber : Sunaryo (2013:217)

Berdasarkan skema tersebut, dapat diartikan masyarakat memiliki peran yang selaras dengan peran pemerintah dan juga swasta. Namun, faktanya masyarakat hanya berperan minim apabila dibandingkan dengan kedua stakeholder lainnya. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses masyarakat terhadap pariwisata yang tersedia dan keterlibatan yang masih rendah dalam mengambil sebuah keputusan/ketetapan.

Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada komunitas dengan sumber daya dan keunikan komunitas yang berupa elemen fisik maupun non fisik seperti budaya dan tradisi yang menjadi ciri khas dalam komunitas tersebut. Hal tersebut yang akan menjadi penggerak utama dalam pembangunan pariwisata. Sunaryo

(2013:218) berpendapat bahwa upaya untuk pengembangan pariwisata dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang baik maka dapat dilakukan dengan memudahkan partisipasi yang luas pada komunitas masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan nilai manfaat pada faktor ekonomi dan sosial dalam kegiatan pariwisata. Masyarakat setempat dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah dan swasta memiliki posisi yang sama.

Jadi, pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata adalah upaya memberdayakan masyarakat dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan menggunakan potensi pariwisata yang dimiliki daerah tersebut. Dengan potensi wisata yang dimiliki maka suatu daerah bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata bisa dilakukan dengan mengembangkan obyek wisata yang ada di daerah tersebut.

Spillane (1994:132) menyatakan bahwa terdapat berbagai elemen untuk melihat hubungan kepariwisataan dan pembangunan ekonomi yang meliputi : struktur ekonomi nasional, migrasi tenaga kerja, hubungan antara perpindahan modal, serta jenis pariwisata. Dari pernyataan di atas, pengembangan pariwisata memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan maupun lapangan pekerjaan, meningkatkan inovasi untuk terus menarik wisatawan untuk datang dan melakukan perubahan organisasi melalui peningkatan kualitas SDM guna menjadikan pariwisata profesional dan lebih terarah.

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2015:188-195), lingkup pengenalan wilayah kerja pemberdayaan masyarakat setidaknya harus mencakup :

1. Keadaan sumber daya alam

Aspek ini mencakup sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah yang bisa menjadi penggerak pemberdayaan atau justru menghambatnya.

2. Keadaan sumber daya manusia

Karakteristik sumber daya manusia berisikan tentang besarnya ukuran keluarga, jumlah dan kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, keragaman penduduk menurut umur dan jenis kelamin, pendidikan penduduk, mata pencaharian penduduk, nilai-nilai sosial budaya, manajemen dan resolusi konflik, serta kepatuhan warga masyarakat.

3. Keadaan kelembagaan untuk pembangunan meliputi kelembagaan ekonomi dan sosial. Sebuah lembaga berperan sebagai pelaksana dalam program sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

4. Keadaan sarana dan prasarana bagi pembangunan. Sarana dapat diartikan sebagai fasilitas yang dapat menunjang berjalannya suatu program pemberdayaan.

5. Kebijakan pembangunan. Kebijakan yang ada dalam suatu daerah bisa dijadikan sebagai dasar dalam penetapan aturan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Kebijakan pembangunan dalam proses pemberdayaan bisa disusun dengan musyawarah bersama pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut.

6. Potensi ekonomi dan keunggulan lokal. Aspek ini dapat berfungsi untuk menumbuhkan daya saing dan bersinergi dengan pemerintah baik daerah maupun tingkat nasional, serta dapat menumbuhkan kerja sama dengan pihak swasta.
7. Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat yang meliputi rincian kegiatan, struktur organisasi, jenjang karier, serta adanya hak dan kewajiban antar anggota organisasi.

Aspek-aspek diatas dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui faktor pendukung dalam suatu kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Dimulai dari keadaan sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana, kebijakan pembangunan, organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat serta keadaan kelembagaan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep

Penelitian ini difokuskan pada fenomena pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pariwisata di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang dilihat dari konsep efektivitas serta faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

1.7.1.1 Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat berbasis Pariwisata di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang

Efektivitas program digunakan untuk menilai suatu program terlaksana dengan efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat berarti menilai program pemberdayaan tersebut terlaksana sesuai dengan target program yang telah diputuskan. Pada penelitian ini ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan masyarakat adalah menurut Sutrisno yang berisikan tentang indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan. Pemilihan ukuran ini dikarenakan dalam ukuran yang dikemukakan oleh Sutrisno terdapat lima indikator dimana masing-masing indikator dapat digunakan untuk menilai efektivitas program dengan lebih dalam yang dilihat berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, serta output dari program pemberdayaan masyarakat.

Pada variabel pemahaman program dapat digunakan untuk melihat pemahaman program oleh sasaran program pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat Desa Punjulharjo. Variabel ketepatan sasaran digunakan untuk menilai kesesuaian antara sasaran program dengan program pemberdayaan masyarakat. Variabel ketepatan waktu digunakan untuk menilai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Pada variabel tercapainya tujuan digunakan untuk menilai keselarasan antara hasil dari program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan, pada variabel perubahan nyata digunakan untuk menilai hasil dari program pemberdayaan masyarakat sehingga pada kuesioner pada variabel ini

dijadikan satu dengan variabel tercapainya tujuan. Pada penelitian ini akan difokuskan pada efektivitas program yaitu terkait program pemberdayaan masyarakat pariwisata. Sedangkan, untuk indikator yang akan digunakan untuk mengukur efektivitasnya meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta tercapainya tujuan.

1.7.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata di Desa Punjulharjo

Untuk mengidentifikasi yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari suatu program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui :

a. Keadaan Sumber Daya Alam

Pada aspek ini, akan melihat tentang potensi sumber daya alam yang ada di suatu daerah yang dapat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Keadaan Sumber Daya Manusia

Aspek ini melihat pada aspek manusia yang akan diikutsertakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Aspek ini merupakan aspek yang penting, karena manusia menjadi subyek dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga kualitas sumber daya manusia bisa berpengaruh terhadap kegiatan pemberdayaan.

c. Keadaan kelembagaan untuk pembangunan

Faktor ini akan dilihat bagaimana keadaan kelembagaan yang terdapat di suatu daerah yang bisa menjadi faktor penghambat atau pendukung dalam kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan.

d. Keadaan sarana dan prasarana untuk pembangunan

Sarana dan prasarana menjadi faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan suatu program. Dengan sarana dan prasarana yang memadai maka suatu program atau kegiatan bisa berjalan dengan baik.

e. Kebijakan pembangunan

Kebijakan dapat digunakan untuk mendukung suatu program berdasarkan pada peraturan yang jelas sehingga program pemberdayaan yang dilakukan memiliki dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya.

f. Potensi ekonomi dan keunggulan

Potensi ekonomi bisa menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan untuk melakukan suatu pemberdayaan. Ketersediaan potensi ekonomi yang mencukupi bisa mendukung suatu program pemberdayaan.

g. Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat

Suatu organisasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa menentukan berhasil tidaknya suatu program. Karena setiap anggota dalam organisasi tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda dan saling mendukung satu sama lain. Sedangkan, administrasi akan membantu dalam mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat agar terkelola dengan baik.

1.7.2 Fenomena Penelitian

1.7.2.1 Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata di Desa Punjulharjo

Ukuran efektivitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas program meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata. Namun, dalam penelitian ini akan digunakan empat indikator untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata yang meliputi :

a. Pemahaman program

Ukuran efektivitas program dengan melihat pemahaman program oleh para warga yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Indikatornya meliputi :

1. Pemahaman tentang adanya program pemberdayaan masyarakat
2. Pemahaman tentang syarat-syarat untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan
3. Penjelasan pihak pelaksana terkait program pemberdayaan masyarakat

b. Ketepatan Sasaran

1. Tingkat kepuasan warga terhadap program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata
2. Keikutsertaan seluruh warga desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata

c. Ketepatan Waktu

1. Tahun program tersebut dilaksanakan

2. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi oleh pihak pelaksana program
- d. Tercapainya tujuan
1. Kesejahteraan warga semakin meningkat dengan adanya program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata
 2. Kehidupan perekonomian warga semakin meningkat dengan adanya program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata
 3. Tingkat pendapatan warga semakin meningkat dengan adanya program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata

1.6.2.2. Faktor Penghambat Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata di Desa Punjulharjo

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi program pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Keadaan sumber daya alam

Melihat faktor sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah untuk digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini, akan dilihat keadaan sumber daya alam di Desa Punjulharjo melalui aspek topografi wilayah, lokasi geografis, jenis tanah, iklim, lokasi administratif, bencana alam rutin, serta status dan luas pemilikan lahan.

b. Keadaan sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek yang penting dalam kegiatan pemberdayaan. Masyarakat bisa berperan sebagai penggerak sekaligus obyek dari pemberdayaan tersebut sehingga kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kegiatan sumber daya masyarakat. Dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana keadaan sumber daya manusia di Desa Punjulharjo baik pihak pengelola maupun masyarakat sebagai obyek pemberdayaan masyarakat.

c. Keadaan kelembagaan untuk pembangunan

Dalam penelitian ini, akan melihat tentang kondisi kelembagaan yang ada di Desa Punjulharjo seperti keadaan organisasi desa untuk mendukung pembangunan.

d. Keadaan sarana dan prasarana untuk pembangunan

Dalam penelitian ini, akan melihat tentang keadaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan program pemberdayaan berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo, apakah sarana dan prasarana yang tersedia telah memadai guna mendukung program pemberdayaan atau justru sebaliknya.

e. Kebijakan pembangunan

Penelitian ini akan melihat tentang ketersediaan dari suatu kebijakan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo. Apakah terdapat kebijakan yang jelas

untuk dijadikan dasar dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di desa tersebut.

f. Potensi ekonomi dan keunggulan

Penelitian ini, akan melihat adakah potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Punjulharjo guna mendukung program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata serta keunggulan apa yang dimiliki desa tersebut guna mendukung program pemberdayaan.

g. Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat

Penelitian ini, akan melihat bagaimana organisasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sudahkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sedangkan, administrasi pemberdayaan masyarakat akan dilihat aspek administrasi dalam mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Punjulharjo.

1.7.3 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method atau gabungan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Pada rumusan pertama dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan objek yakni program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Pada intinya, penelitian ini ditekankan pada seberapa efektifkah program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Desa Punjulharjo dilihat dari perspektif warga yang terlibat dalam program pemberdayaan dan dengan didukung oleh data riil dari Pemerintah Desa itu sendiri.

Sedangkan, pada rumusan kedua menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo. Metode kualitatif sengaja dipilih oleh peneliti dikarenakan adanya keterbatasan pihak yang bisa dijadikan sumber informasi terkait faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan masyarakat. Pengetahuan dan informasi tentang faktor pendukung dan penghambat hanya diketahui oleh pihak-pihak internal yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat, seperti dari pihak perangkat desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara bersama pihak yang berperan penting dalam program pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini adalah pemerintah desa dan BUMDES di Desa Punjulharjo.

Jadi, berdasarkan definisi di atas, maka penelitian yang akan dilakukan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pada metode penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner untuk diberikan kepada masyarakat Desa Punjulharjo yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. Bentuk penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan yang telah dikumpulkan selama proses penelitian, kemudian dengan dasar indikator-indikator yang digunakan peneliti dan berusaha untuk menggali fakta dari objek penelitian untuk mengetahui sejauh mana keefektifan dari program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata terhadap

masyarakat Desa Punjulharjo. Pada rumusan kedua, peneliti menggunakan metode kualitatif dimana pedoman wawancara (*interview guide*) menjadi instrumen penelitian. Pihak-pihak yang akan menjadi narasumber berasal dari perwakilan dari pemerintah desa dan BUMDES.

1.7.4 Populasi dan Sampel

1.7.4.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi unit analisis dalam penelitian. Populasi yang diteliti adalah warga Desa Punjulharjo yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Punjulharjo. Masyarakat tersebut berjumlah 151 orang terdiri dari 12 orang pengelola obyek wisata, 85 orang pedagang dan 54 orang penyedia wahana yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

1.7.4.2 Sampel

Sampel dapat diartikan sebagai bagian populasi dengan ciri atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penelitian. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan tertentu yang dapat mewakili keseluruhan populasi. Jumlah keseluruhan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo adalah sebanyak 151 orang. Menurut Nanang Martono (2012), penentuan sampel dapat dilakukan dengan ditentukannya jumlah sampel dengan tabel penentu jumlah sampel oleh Issac dan Michael Adapun tabel yang menunjukkan jumlah sampel menurut Issac dan Michael adalah :

Tabel 1.4
Penetapan Jumlah Sampel oleh Issac dan Michael

N	S		
	1%	5%	10%
10	10	10	10
15	15	14	14
20	19	19	19
25	24	23	23
30	29	28	27
35	33	32	31
40	38	36	35
45	42	40	39
50	47	44	42
55	51	48	46
60	55	51	49
65	59	55	53
70	63	58	56
75	67	62	59
80	71	65	62
85	75	68	65
90	79	72	68
95	83	75	71
100	87	78	73
110	94	84	78
120	102	89	83
130	109	95	88
140	116	100	92
150	122	105	97
160	129	110	101
170	135	114	105
180	142	119	108
190	147	123	112
200	154	127	115
210	160	131	118
220	165	135	122
230	171	139	125
240	176	142	127
250	182	146	130
260	187	149	133
270	192	152	135

Sumber : Sugiyono, 2007

Berdasarkan tabel tersebut dengan jumlah populasi sebanyak 151 orang dan dengan tingkat kesalahan 10%, maka diperoleh sampel yang berjumlah 101 orang. Berdasarkan hal itu, jumlah sampel yang akan diteliti dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo adalah sebanyak 101 orang.

1.7.5 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik Proportional Sampling. Dalam penelitian ini, karena populasi yang ada seluruh warga Desa Punjulharjo yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat, dimana warga yang terlibat terbagi dalam beberapa bidang pekerjaan seperti pengurus obyek wisata, pedagang, dan penyewa wahana di obyek wisata. Adapun daftar bidang pekerjaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jenis-jenis Pekerjaan Warga Desa Punjulharjo dalam Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	Pengelola Obyek Wisata	12 orang
2.	Pedagang	73 orang
	- Warung	12 orang
	- Asongan	
3.	Penyedia Wahana	
	- ATV	15 orang
	- Permainan	4 orang
	- Perahu Wisata	11 orang
	- Ban/Perahu Karet	24 orang

Sumber : Data Badan Pengelola Pantai Karang Jahe

Berdasarkan kategori di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan teknik Proportional Sampling dimana masing-masing unit pekerjaan akan dipilih wakil-wakilnya untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Sampel pada jenis pekerjaan pengelola wisata berjumlah 12 orang, pada jenis pekerjaan pedagang diambil sebanyak 59 orang, dan jenis pekerjaan penyedia wahana sebanyak 30 orang sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 101 orang.

1.7.6 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata di Desa Punjulharjo” terbagi ke dalam dua yaitu :

a. Data Primer

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pembagian kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah Perangkat Desa Punjulharjo dan warga desa yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo.

b. Data Sekunder

Data diperoleh melalui website Desa Punjulharjo yang memuat tentang monografi desa, serta data dari Pemerintah Desa Punjulharjo mengenai peraturan desa tentang pengelolaan obyek wisata, jumlah warga yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, serta jumlah wisatawan di obyek wisata Karang Jaha Beach dan Situs Perahu Kuno.

1.7.7 Skala Pengukuran

Skala pengukuran dipergunakan sebagai dasar penentuan panjang interval dalam alat ukur guna mendapatkan data kuantitatif (Sugiyono, 2012:92). Skala ordinal ialah Skala ordinal merupakan skala yang digunakan berdasar oleh ranking,urut disesuaikan berdasar kelas tertinggi hingga paling rendah, ataupun sebaliknya (Ridwan, 2007:84). Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa penelitian ini akan menggunakan skala ordinal. Hal ini dikarenakan kuesioner akan didasarkan pada ranking kelas tertinggi hingga terendah. Poin tertinggi bernilai empat, dan yang terendah bernilai satu. Poin empat digunakan untuk alternatif jawaban yang sangat mendukung, sedangkan poin satu digunakan untuk alternative jawaban yang tidak mendukung.

1.7.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam pengumpulan data sekunder dan primer meliputi :

1. Observasi

Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo, Kabupaten Rembang.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan Kepala Desa serta Perangkat Desa Punjulharjo yang mengurus kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di desa tersebut.

3. Kuesioner

Kuesioner penelitian ini berisikan sepuluh item pertanyaan dengan empat pilihan jawaban bernilai satu sampai dengan empat. Kuesioner diberikan kepada masyarakat Desa Punjulharjo yang terlibat dalam program.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa peraturan desa, profil Pantai Karang Jahe.

1.7.9 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu kuesioner yang bersifat tertutup untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Kuesioner berisikan sepuluh item pertanyaan yang terbagi kedalam empat variabel efektivitas program. Pada variabel pemahaman program terdapat tiga item pertanyaan yang merinci tentang variabel ini. Kemudian, pada variabel ketepatan sasaran dan ketepatan waktu masing-masing berisikan dua item pertanyaan. Sedangkan, pada variabel tercapainya tujuan terdapat tiga item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel ini. Setiap item pertanyaan terdapat empat pilihan jawaban dengan poin satu untuk jawaban tidak mendukung dan poin tertinggi yaitu empat untuk pilihan jawaban yang sangat mendukung.

Pada rumusan kedua yang menggunakan metode kualitatif maka instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara yang berisi tentang daftar pertanyaan yang akan dilontarkan kepada narasumber untuk memperoleh data terkait faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan masyarakat. Pedoman wawancara berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada aspek keadaan sumber daya alam, keadaan sumber daya manusia,

keadaan kelembagaan, keadaan sarana dan prasarana, kebijakan pembangunan, potensi ekonomi dan keunggulan lokal, serta organisasi dan administrasi pemberdayaan yang kemudian akan dikategorikan mana faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Punjulharjo.

1.7.10 Teknik Analisis

Menurut Hasan (2006:24), data penelitian diolah untuk memeringkas data dengan rumus tertentu. Menurut Sudjana (2001:128), pengolahan data digunakan untuk mengolah data penelitian menjadi data olahan yang lebih detail sehingga bisa dijadikan arahan dalam mengkaji penelitian lebih lanjut. Interval kelas digunakan sebagai alat ukur guna melihat efektivitas program, dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Interval } (i) &= \frac{\text{Nilai atas} - \text{Nilai bawah}}{\text{Jumlah Kelas}} \\ &= \frac{4 - 1}{4} \\ i &= \frac{3}{4} \\ i &= 0,75 \end{aligned}$$

- a. Nilai 1 hingga 1,75 berarti program tersebut tidak efektif.
- b. Nilai > 1,75 hingga 2,5 berarti program tersebut dinilai kurang efektif.
- c. Nilai > 2,5 hingga 3,25 berarti program tersebut bisa dikatakan efektif.
- d. Nilai > 3,25 hingga 4 berarti program tersebut masuk dalam kategori sangat efektif.

Untuk mendapatkan nilai-nilai di atas maka pengukuran efektivitas dihitung dengan mencari nilai rata-rata (mean) pada setiap item pertanyaan yang kemudian dikelompokkan menjadi satu variabel. Kemudian, dikategorikan pada empat kategori mulai dari tidak efektif sampai sangat efektif berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan. Setelah didapatkan nilai rata-rata (mean) per variabel maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata keseluruhan variabel sehingga didapatkan nilai akhir yang menjadi nilai rata-rata (mean) variabel efektivitas program.

Pengolahan data menurut Hasan (2006:24) meliputi kegiatan :

1. Editing

Editing berfungsi untuk mengoreksi data yang didapat untuk menghapus kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi saat mencatat data di lapangan.

2. Coding (Pengkodean)

Coding adalah memberikan kode-kode pada data-data yang masuk di dalam pengkategorian yang sama. Pemberian identitas data dilakukan dengan cara membuat kode berupa huruf ataupun angka.

3. Pemberian skor atau nilai

Dalam pemberian skor digunakan skala ordinal yang merupakan salah satu cara dalam menentukan skor. Penentuan skor nilai pengukuran adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian dengan poin empat untuk pilihan jawaban yang paling mendukung.
- b. Penilaian dengan poin tiga untuk pilihan jawaban yang mendukung.

- c. Penilaian dengan poin dua untuk pilihan jawaban yang kurang mendukung.
- d. Penilaian dengan poin satu untuk pilihan jawaban yang tidak mendukung.

4. Tabulasi

Proses dimana data penelitian dimasukkan ke dalam tabel dengan kode yang tepat berdasarkan analisis yang diperlukan. Hal ini memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi salah dalam pemberian kode. Tabel tabulasi dapat berbentuk sebagai berikut :

- a. Tabel pemindahan, yaitu pemindahan kode dari kuesioner untuk mencatat pengamatan yang digunakan sebagai arsip.
- b. Tabel biasa, yaitu penyusunan tabel berdasarkan karakteristik responden dan tujuan khusus.
- c. Tabel analisis, yaitu proses memasukkan data-data yang telah dianalisa.

5. Rancangan Pengukuran Indikator

Rancangan pengukuran indikator berisi tentang daftar indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata.